



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I GUSTI GDE PERYATNA
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PENYULUHAN DAN LAYANAN INFORMASI KPPBC TIPE MADYA PABEAN CIKARANG
3. NHK : 32804

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.911.694.000**

1. Tanah Seluas 232 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , HASIL SENDIRI Rp. 415.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 141 m2/173 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 295.794.000
3. Bangunan Seluas 34 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 200.900.000
4. Tanah Seluas 500 m2 di KAB / KOTA BADUNG, WARISAN Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 253.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA BLADE SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOBIL, HONDA HR-V JEEP Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
5. MOTOR, VESPA VESPA S I GET 125 FL A/T SCOOTER Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
6. MOTOR, HONDA F1CO2N46LO A/T SOLO Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	286.967.400
D. SURAT BERHARGA	Rp.	18.500.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	501.183.079
F. HARTA LAINNYA	Rp.	21.000.000
Sub Total	Rp.	2.992.344.479
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.992.344.479

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.